



Steril dari Aktivitas Kampanye Pilpres

MALIOBORO merupakan kawasan yang sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Termasuk kepentingan bernuansa politik ■
 ▶ Baca *Steril...* Hal 11

Aturan Tak Beda Jauh dari Pileg

■ STERIL...

Sambungan dari hal 1

Selama pelaksanaan masa kampanye Pilpres 2014, Malioboro bakal dijaga agar tidak menjadi ajang kampanye pilpres. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti ingin Malioboro steril dari kampanye pilpres. Untuk itu, dia menyiapkan peraturan wali kota (perwal) untuk melindungi ikon Kota Jogja itu. Dia telah menyerahkan penyusunan draf tersebut ke Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setkot) Jogja. Sejak masa kampanye pilpres dimulai 4 Juni, ada calon presiden dan calon wakil presiden serta tim pemenangan yang menggelar sosialisasi di Malioboro. Padahal, dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu Malioboro adalah daerah larangan untuk kampanye.

“(Sekarang) sedang membuat perwal. Nanti kami tertibkan,” tandas HS di Kepatihan Pemprov DIJ kemarin (9/6). Mantan wakil wali kota era Herry Zudianto ini menjanjikan, perwal untuk melindungi Malioboro dari hiruk pikuk kampanye bakal terbit dalam pekan ini. Pemkot akan membuat perwal tersebut sama seperti saat mengatur kampanye pileg lalu. “Semuanya sama. Intinya, Malioboro steril dari kegiatan kampanye atau politik,” ujar HS. Dia menegaskan, pemkot akan melarang semua kegiatan bernuansa politik di Malioboro. Itu mencakup kegiatan kampanye atau pemasangan spanduk. “Intinya tidak berbeda jauh dengan

perwal pileg,” lanjutnya. Seperti diketahui, pekan lalu capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla sempat menyapa pedagang di Pasar Beringharjo. Pasangan nomor urut 1 itu masuk ke pasar tradisional terbesar di Jogjakarta tersebut. Selang sehari, giliran tim sukses (timses) dari capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Mereka memanfaatkan Titik Nol Kilometer untuk deklarasi relawan. Atas aksi dari timses dan capres serta cawapres tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja Agus Triyatno mengaku tak bisa melakukan tindakan. Ini karena memang tak ada aturan larangan kampanye di Malioboro. “Tidak ada aturannya. Ber-

beda dengan pileg yang memang diatur jika Jalan Malioboro steril kegiatan politik,” kata Agus. Agus, yang pernah menjabat sebagai ketua Panwalu DIJ, mengatakan, tanpa ada perwal maka kampanye di Malioboro tidak dapat disebut melanggar. Sebab, kawasan tersebut tak masuk kawasan larangan sebagai ajang kampanye. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Syarif Teguh menyatakan belum ada regulasi khusus tentang kampanye di Malioboro terkait pilpres. Dengan demikian, lembaganya masih memberikan ruang kepada setiap timses maupun capres dan cawapres untuk berkampanye. “Tapi jika ada penerbitan perwal, bisa segera melakukan tindakan tegas,” jelasnya. (eri/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
4. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 28 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005